

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN ALAI, KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Nikodimus^{1*}, Abang Zainudin^{2*}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, nangabayan@gamil.com

Abstract: *Waste management is a major challenge in achieving a clean, healthy, and sustainable environment. This study aims to evaluate the implementation of waste management policy in Alai Urban Village, Sintang Regency, focusing on identifying the various obstacles encountered during its execution. The study employs a descriptive-qualitative approach involving literature reviews, field observations, and interviews with local government officials, sanitation workers, and community members. The results indicate that the implementation of the waste management policy has not been optimal. Key obstacles include low public awareness regarding waste sorting and disposal, limited facilities and infrastructure, a lack of supervision, and constrained operational budgets. The study recommends enhancing public education, providing adequate waste management facilities, strengthening inter-agency coordination, and increasing community participation to improve the policy's effectiveness*

Keywords: *Policy Evaluation; Waste Management*

Abstrak: Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Alai, Kabupaten Sintang, dengan fokus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan aparat kelurahan, petugas kebersihan, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan, serta terbatasnya anggaran operasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi masyarakat, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai upaya meningkatkan efektivitas kebijakan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah menjadi isu yang semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai

kebijakan untuk mengatur pengelolaan sampah, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat kelurahan. Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia. Menurut Hendrik L. Blum, 1974 dalam Slamet, 2016 menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor terbesar dalam mempengaruhi derajat kesehatan,

sehingga menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan, sebab masyarakat dituntut mampu menyelesaikan permasalahan menyangkut lingkungan hidupnya. Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah tentang kebersihan. Kebersihan adalah sebuah cerminan setiap individu dalam menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan suatu keadaan.

Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Stigma masyarakat terkait sampah adalah semua sampah itu menjijikkan, kotor, dan lain-lain sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya (Mulasari, 2012). Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar (Hardiatmi, 2011). Permasalahan sampah meliputi 3 bagian yaitu pada bagian hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir, pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada bagian proses, keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada bagian hulu, berupa kurang optimalnya sistem yang diterapkan pada pemrosesan akhir (Mulasari, 2016). Sebagian besar masyarakat menganggap membakar sampah merupakan bagian dari pengolahan sampah. akan tetapi, hal seperti itu bisa menyebabkan pencemaran bagi lingkungan dan

mengganggu kesehatan. Sikap seperti ini ada kemungkinan dipengaruhi oleh pengetahuan dan kematangan usia (Mulasari, 2012). Membangun kesadaran masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak ketiga sebagai pendukung. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangun kesadaran itu. Diperlukan pula contoh dan teladan yang positif serta konsistensi dari pihak pengambil kebijakan di suatu wilayah tertentu. Kegiatan sosialisasi secara langsung tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan (Rizal, 2011).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 (Perpres 109/2025) tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Kebijakan ini menandai perubahan besar arah pembangunan lingkungan hidup dan energi nasional menuju sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Perpres 109/2025 menghadirkan lompatan besar dibandingkan kebijakan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Regulasi baru ini memperkuat arah pengelolaan sampah nasional melalui beberapa penyempurnaan penting, antara lain:

1. Pertama, jika peraturan terdahulu berfokus pada percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 lokasi

prioritas, kini Perpres 109/2025 memperluas sasaran ke seluruh daerah yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan;

2. Kedua, peraturan ini menegaskan peran Danantara berupa dalam pembangunan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), meliputi dukungan investasi serta pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL (BUPP PSEL).
3. Ketiga, Perpres 109/2025 memberikan terobosan dalam percepatan perizinan dan mekanisme pendanaan, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
4. Keempat, pemerintah memberikan jaminan kepastian investasi melalui penetapan tarif listrik tetap sebesar USD 0,20 per kWh selama 30 tahun dan kewajiban PT PLN membeli listrik hasil olahan sampah. Skema ini diharapkan mampu menarik minat investor, memperkuat keberlanjutan proyek, dan menempatkan fasilitas PSEL sebagai bagian penting dari transisi energi bersih nasional; dan
5. Kelima, pemerintah daerah memiliki dua kewajiban utama dalam pembangunan PSEL, yaitu menyiapkan lahan serta memastikan pasokan dan pengangkutan sampah ke instalasi PSEL berjalan berkelanjutan.
6. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sintang

Kelurahan Alai, Kabupaten Sintang, merupakan salah satu wilayah yang terus berupaya meningkatkan

kualitas pengelolaan sampah melalui penyediaan layanan kebersihan dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan permasalahan seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Alai dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui: Observasi terhadap kondisi pengelolaan sampah di lingkungan Kelurahan Alai, Wawancara dengan aparat kelurahan, petugas kebersihan, dan masyarakat, Dokumentasi dan studi literatur mengenai kebijakan pengelolaan sampah. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Alai telah dilakukan melalui penyediaan tempat penampungan sementara, pengangkutan sampah secara berkala, serta sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Namun, implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Beberapa kendala yang ditemukan meliputi:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat, ditunjukkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan dan belum terbiasanya pemilahan sampah dari sumbernya.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jumlah tempat sampah dan armada pengangkut yang belum memadai.
3. Terbatasnya anggaran, sehingga kegiatan operasional dan pemeliharaan fasilitas belum optimal.
4. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan, yang menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan masih rendah.
5. Koordinasi antar-pemangku kepentingan yang belum maksimal dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan.

Ada Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah;
2. menyediakan fasilitas pemilahan dan tempat sampah yang memadai;
3. memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat;
4. melibatkan kelompok masyarakat, sekolah, dan organisasi lokal dalam program kebersihan;
5. menerapkan pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.

Masalah kesehatan disebabkan oleh penumpukan sampah yang menjadi sarang bagi vektor dan rodent. Salah satu masalah kesehatan yang terjadi

adalah penyakit diare dan penyakit kulit pada musim hujan. Penyakit tersebut berawal dari genangan air di tumpukan sampah kemudian menjadi sarang bagi vektor dan rodent sehingga menyebabkan seseorang terkena penyakit. Mayoritas rumah tangga tidak memiliki tempat sampah dan membuang sampah disekitar rumah. Pada saat tertentu, warga perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga membersihkan sampah disekitar rumahnya dengan cara disapu. Setelah sampah terkumpul, tindakan yang dilakukan adalah membakar kumpulan sampah tersebut atau sebagian dari warga membuang sampah tersebut di titik penampungan sampah desa yang terletak di beberapa titik wilayah pemukiman desa. Menurut Ikhsandri (2014) mengatakan bahwa tindakan membakar sampah merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, akan tetapi pembakaran sampah dilakukan di lapangan yang jauh dari pemukiman. Namun, pembakaran seperti ini susah dikendalikan karena terdapat asap, angin kencang, debu, dan arang sampah yang mana akan terbawa ke tempat sekitar sehingga menimbulkan gangguan. Pembakaran yang paling baik yaitu dilakukan dengan insinerator agar tidak menimbulkan gangguan akan tetapi memerlukan biaya yang mahal.

Tumpukan sampah yang membusuk juga bisa mengundang serangga dan hewan, seperti lalat, kecoa, atau tikus, yang akan membawa dampak buruk untuk kesehatan tubuh manusia. Berikut adalah beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat membuang sampah

sembarangan. Virus hepatitis A merupakan penyebab infeksi yang menimbulkan adanya gangguan fungsi hati akut. Infeksi ini termasuk penyakit yang dapat disebabkan oleh sampah dan menyebar melalui sampah. Disentri adalah radang usus yang menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Diare sendiri ditandai dengan sering buang air besar yang lunak atau cair. Kondisi ini disebabkan oleh ameba dan bakteri yang banyak ditemukan pada sampah yang berserakan. Salmonellosis adalah penyakit yang timbul akibat infeksi bakteri *Salmonella* di dalam perut dan usus.

Sebagian besar pasien salmonellosis hidup dalam kondisi lingkungan yang miskin, berpolusi, serta kebanyakan dekat dengan lingkungan yang tercemar dan penuh sampah. Penyakit pes disebabkan oleh bakteri *Yersinia pestis* yang ditularkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Umumnya, penyakit pes tersebar di daerah yang lingkungan padat penduduk dan pastinya memiliki tingkat kebersihan yang buruk, alias sampah tersebar di mana-mana. Maka dari itu, risiko penyakit ini bisa mengalami peningkatan yang disebabkan oleh sampah. Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk *Aedes aegypti*. Kondisi ini dulu disebut dengan penyakit "break-bone" karena kadang menyebabkan nyeri sendi dan otot, sehingga membuat tulang terasa retak. Nyamuk demam berdarah sering berkembang biak di genangan air pada

sampah yang dibuang sembarangan. Maka dari itu, penyakit ini merupakan salah satu dampak dari membuang sampah sembarangan.

Kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Vibrio cholerae*. Paparan terhadap bakteri tersebut bisa terjadi bila Anda mengonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang mengidap penyakit ini. Anda juga bisa terjangkit kolera jika Anda mengonsumsi air atau mencuci bahan makanan dengan air yang mengandung sampah. Amoebiasis atau diare turis juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh sampah. Penyakit ini rentan terjadi pada orang yang tinggal di pemukiman padat penduduk dengan sistem sanitasi yang buruk. Amoebiasis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Entamoeba histolytica*. Paparan parasit ini mengakibatkan infeksi pada usus besar dan hati.

Perilaku terhadap sampah tersebut sudah menjadi budaya yang mengakar pada masyarakat. Hal ini berdampak pada pola pikir (mindset) masyarakat terkait sampah yang kurang sesuai. Misalnya tumpukan sampah yang tidak nyaman dipandang. Bagi masyarakat Desa Disanah, kondisi tersebut menjadi hal yang biasa dan tidak perlu diatasi. Sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi masalah penumpukan sampah tersebut. Bahkan masyarakat Desa Disanah beranggapan bahwa kerjabakti yang biasanya dilakukan untuk membersihkan desa adalah kegiatan membersihkan jalan dari

berbagai penghalang seperti ranting pohon. Budaya masyarakat yang kurang tepat tersebut perlu diubah. Hasil observasi menunjukkan bahwa warga Desa Disanah tidak memiliki tempat sampah pribadi yang digunakan untuk membuang sampah rumah tangga setiap harinya. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari oleh warga dikumpulkan dalam kantong plastik dan dibuang ke lahan dekat tambak sebagai pembuangan terakhirnya. Menurut UU No. 18 tahun 2008 sampah dibuang di tempat penampungan sementara (TPS) sebelum akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Tiap desa atau kelurahan hendaknya memiliki TPS untuk menampung seluruh sampah warganya agar mudah untuk dibawa ke TPA, namun di Desa Disanah tidak terdapat TPS. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya lahan dan tidak ada transportasi untuk membawa sampah ke TPA sehingga warga cenderung membuang sampah pada lahan kosong dan membakarnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Alai, Kabupaten Sintang, telah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menyediakan layanan kebersihan. Namun, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, terutama rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas, minimnya anggaran, serta lemahnya pengawasan. Perbaikan kebijakan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku

kepentingan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- Kelurahan perlu memperkuat edukasi dan kampanye lingkungan secara berkelanjutan.
- Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memilah, mengurangi, dan mengelola sampah dari sumbernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (berbagai publikasi terkait pengelolaan sampah).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 (Perpres 109/2025) tentang Penanganan Sampah
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sintang